

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Rethy dan Anis Chairiri. 2015. *Money Laundering dan Keterlibatan Wanita: Tantangan Baru bagi Auditor Investigative*. *Journal of Accounting*, Volume 4, No.3.
- Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, Doordrecht: Springer, 2006.
- Bivitri Susanti. 2019. *Pemenuhan Implementasi UNCAC dalam Perspektif Perundang-Undangan Indonesia*. STH Indonesia Jentera.
- Brenda Gartland, *Asset Forfeiture: Rules and Procedures, Washington D.C.: Forfeiture Endangers American Rights (FEAR)*, 2009.
- CNN Indonesia. 2020. *ICW Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 39,2 triliun di Tahun 2020*. Diakses melalui: ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp39,2 T di 2020 (cnnindonesia.com) pada Minggu, 20 Desember 2020 pukul 09.10 WIB
- Dahlan. 2015. *Distorsi Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Pembuktian*. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 10, No. 1.
- Edi Nasution, "Pemulihan Aset (Asset Recovery) Dengan Menyita Aset Ilegal", [http://www.ppatk.go.id/files/PEMULIHANASET\\_ASSETRECOVERY\\_DENGANMENYITASETILEGAL\\_PAPER\\_EDINST\\_10JUNI20130.pdf](http://www.ppatk.go.id/files/PEMULIHANASET_ASSETRECOVERY_DENGANMENYITASETILEGAL_PAPER_EDINST_10JUNI20130.pdf), diakses tanggal 15 Maret 2015.
- Eka Iskandar, "*Prinsip Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Bagian III)*", <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/09/01/prinsip-pengembalian-aset-hasil-korupsi-bagian-ii/>, diakses tanggal 15 Maret 2015.
- Hadi Purwadi. 2016. *Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi*. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. IV No.2*.
- Hafid, "Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perspektif Economic Analysis Of Law."

Haswandi. 2016. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia. Disertasi Doktor Universitas Andalas.

Haswandi. 2016. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia. Disertasi Doktor Universitas Andalas.

Imelda F.K. Bureni, 2016. Kekosongan Hukum Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 45 No. 4.

July Wiarti. 2017. Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Langkah Untuk mengembalikan Kerugian Negara (Perspektif Analisis Ekonomi terhadap Hukum. UIR Law Review No.1.

Kejagung Baru Rampas Rp18 Miliar Dari Skandal Korupsi Jiwasraya,” [mediaindonesia.com](https://mediaindonesia.com), n.d., <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/476842/kejagung-baru-rampas-rp18-miliar-dari-skandal-korupsi-jiwasraya>.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, 2012.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.

Refki Saputra. 2017. Tantangan Penerapan Perampasan Aset tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia. [Riserpublik.com](http://riserpublik.com) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Romli Atmasasmita, “Urgensi RUU Pengembalian Aset”, <https://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakarhukum/urgensi-ruu-pengembalian-aset/>, diakses tanggal 30 Maret 2015.

RUU Perampasan Aset Berantas TPPU”, <http://www.tokohindonesia.com/lintas-berita/artikel/413131/ruuperampasan-aset-berantas-tppu>, diakses tanggal 20 Maret 2015.

- Sudarto. 2017. Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Volume V Nomor 1. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suratno. 2017. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators pada Penangkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan. Jurnal: Pembaharuan Hukum Volume IV Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UNCAC 2003 dengan tegas meminta negara-negara: "Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases
- Wessy Trisna. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Langsung Tindak Pidana Korupsi. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Yunus Husein. 2019. Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan (Puslitbangkumdil) Mahkamah Agung Republik Indonesia.